

Hanyut di Sungai Ciliwung, Bocah 7 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa

JAKARTA (IM) - Seorang bocah berusia 7 tahun, Arcenio DF terseret arus di Sungai Ciliwung, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis 16 Mei 2024 kemarin. Korban pun berhasil ditemukan pada Jumat (17/5) pagi, tapi sudah dalam kondisi tak bernyawa.

“Jasad korban ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi sudah terapung di perairan kemudian dievakuasi menuju rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga,” ujar Kepala Basarnas Jakarta, Desiana Kartika Bahari melalui keterangan tertulisnya, Jumat (17/5).

Menurutnya, Tim SAR gabungan menemukan korban yang terseret arus di Sungai Ciliwung itu pada sekira pukul 06.10 WIB dalam radius kurang lebih 1,3 KM dari lokasi kejadian. Puluhan personel SAR gabungan dari Basarnas Jakarta, BPBD Jakarta Pusat, Damkar Jakarta Pusat, Polsek Tanah Abang, Koramil Tanah Abang, BAZNAS (BA-

ZIS) DKI Jakarta, IEA Jakarta Pusat, Arya Giri Indonesia, KORGAD Rescue, dan masyarakat sejak kemarin melakukan pencarian terhadap korban.

Pria yang juga SAR Mission Coordinator (SMC) dalam operasi SAR itu menerangkan, awalnya Tim SAR menerima informasi adanya 3 bocah terseret arus sungai Ciliwung pada Kamis (16/5) kemarin sekira pukul 10.30 WIB saat berenang setelah bermain bola. Dua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat bernama Anugerah A (8) dan M Rijia (7), sedangkan satu korban dilakukan pencarian oleh petugas.

“Pencarian pun dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan menyisir aliran Ciliwung hingga radius 2 KM dari lokasi kejadian. Selain itu pencarian dengan pengamatan secara visual melalui jalur darat juga dilakukan di sepanjang bantaran kali Ciliwung hingga radius 2 KM dari lokasi kejadian,” katanya. ● yan

Masuki Kemarau, Pemprov DKI Mulai Siapkan Water Mist

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mempersiapkan penggunaan kabut air (*water mist*) saat Jakarta memasuki musim kemarau untuk menekan polusi udara.

“Ya (untuk mengatasi) polusi udara, di gedung-gedung tinggi seperti tahun lalu diaktifkan bersama ‘water mist’, nanti kalau musim panas kami aktifkan lagi,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (17/5).

Heru mengatakan, untuk menjaga sekaligus menurunkan polusi udara di Jakarta saat musim kemarau, generator kabut air (*water mist generator*) kembali diopekasikan pukul 09.00 sampai 10.00 WIB dan pukul 15.00 sampai 16.00 WIB.

“Ya nanti kalau musim panas kami aktifkan lagi. Kan ada waktunya ya, jam 09.00 WIB sampai 10.00, nanti kalau sore 15.00 WIB sampai 16.00,” kata Heru.

Adapun pemasangan “water mist generator” menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menekan polusi udara. Menurut Heru,

seharusnya pemasangannya terus ditambah sebagai persiapan saat musim kemarau di masa mendatang.

Sebagai kesigapan dalam menghadapi penurunan kualitas udara saat memasuki musim kemarau, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengumpulkan para pemangku kepentingan untuk merumuskan upaya antisipasi potensi penurunan kualitas udara pada Jumat (3/5).

Dalam kesempatan tersebut, selain dari unsur Organisasi Perangkat Daerah Pemprov DKI, juga dihadiri unsur pemangku kepentingan dari pemerintah pusat seperti Kemkeno Kemaritiman dan Investasi (Marves) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan juga organisasi masyarakat sipil hingga akademisi.

“Isu polusi udara menjadi fokus Pemprov DKI sejak dua tahun ke belakang, sekarang benar-benar serius, Jakarta sangat ‘concern’ terhadap pengendalian pencemaran udara, khususnya masalah polusi,” katanya. ● yan

Pj Heru Tegaskan Penonaktifan NIK Sebagai Upaya Penegakan Aturan

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengemukakan, penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP Jakarta bagi warga yang tinggal di luar daerah atau tidak lagi berdomisili di Ibu Kota, merupakan upaya menegakkan aturan.

“Sekali lagi, Pemda DKI hanya melaksanakan aturan yang sudah ada,” kata Heru merespons adanya kritik dari mantan gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait penonaktifan NIK KTP warga Jakarta di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (17/5).

Menurut Heru, jika warga sudah tinggal di daerah lain atau tak lagi di Jakarta maka rumah dan alamatnya bisa dipakai oleh orang yang tidak dikenal. Demi menghindari penyalahgunaan itu, ia mengambil kebijakan menonaktifkan NIK. “Banyak masukan dari tokoh masyarakat,” katanya.

Selain itu, Heru menyebutkan, pengusaha atau pemilik indekos juga mengeluh keberatan terhadap warga yang sudah pindah domisili dari Ja-

karta, tetapi masih memiliki KTP Jakarta. Pun ada warga yang sudah meninggal dunia, tetapi tidak dilaporkan kabar kematiannya kepada perangkat setempat seperti RT dan RW.

“Yang terakhir, yang sangat perlu mendapatkan perhatian, jika seseorang itu kecelakaan, alamatnya berbeda, tempat RT-nya sudah tidak ada RT, tempat lokasi yang di alamat itu sudah tidak ada bangunan rumah, ke mana kita mau memberitahu keluarga? Dan itu terjadi,” kata Heru.

Karena itu, menurut Heru, pentingnya ketertiban terkait administrasi penduduk dari sisi keamanan atau administrasi perbankan. Dia menyebutkan, kebijakan itu terus berjalan, meski dikritik.

Sebelumnya, mantan Gubernur Ahok menilai, warga yang menjadi sasaran penonaktifan NIK akan repot mengurus administrasi kependudukan. Apalagi hal ini bisa memunculkan adanya oknum dari pengurusan dokumen tersebut.

“Bagi saya, itu bukan suatu hal yang sangat penting. Jadi, jangan meropotkan orang lah,” kata Ahok di akun media sosialnya. ● yan

FOTO: ANT



PELEBARAN KALI CILIWUNG DI RAWAJATI

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah) meninjau lahan yang terkena proyek pelebaran kali Ciliwung di Rawajati, Jakarta, Jumat (17/5). Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mulai mengerjakan proyek pelebaran kali Ciliwung di kawasan Rawajati guna mengatasi bencana banjir yang sering terjadi di kawasan tersebut.

Soal ‘Pulau Sampah’, Heru Budi: Kita Tinggal Contoh Negara Lain

Proyek tersebut mencontoh negara yang sudah menerapkan TPA di pulau khusus tengah laut, seperti negara Singapura, Korea Selatan dan Maladewa. Heru Budi mengaku, jika nantinya program ini bisa berjalan, persoalan sampah akan bisa teratasi hingga 100 tahun kedepan.

JAKARTA (IM) - Wacana pembangunan ‘pulau sampah’ di atas laut Jakarta dipertanyakan banyak pihak. Tak sedikit yang meragukan manfaat dari pembangunan tersebut.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan idenya terkait pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA)

atau ‘pulau sampah’ bukan untuk Kota Jakarta melainkan seluruh wilayah penyangga seperti Bekasi, Tangerang dan lainnya.

“Jadi, sekali lagi, nanti pulau itu nanti terbentuk jadi pulau itu pembuangan sampah akhir, pemikiran saya bukan untuk DKI Jakarta, bisa untuk sekitar pesisir,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/5).

Ia menjelaskan, proyek tersebut mencontoh negara yang sudah menerapkan TPA di pulau khusus tengah laut, seperti negara Singapura, Korea Selatan dan Maladewa. Ia mengaku, jika nantinya program ini bisa berjalan, persoalan sampah akan bisa teratasi hingga 100 tahun kedepan.

“Kita tinggal contoh itu. inikan untuk keberlangsungan 50 tahun 100 tahun Jakarta, sekarang sampah saja sudah naik terus kan 7800 ton semakin naik, penduduk juga semakin naik,” jelasnya.

Sebelumnya, pengkampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Muhammad Aminullah mengatakan rencana pembuatan pulau harus dipertanyakan peruntukannya. Jika akan dibuat Tempat Pembuangan

Akhir (TPA) baru, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) justru berencana menghentikan pembangunan TPA.

Hal yang perlu menjadi fokus pemprov DKI, kata Anca, ialah mengatasi produksi dan pengurangan sampah dari sumber, seperti pemilahan jenis sampah yang beragam.

“Mau dibuat TPA? KLHK saja berencana menghentikan pembuatan TPA baru, Ja-

karta malah mau buat. logika pembuatan pulau ini sama dengan program incinerator dan rdf plant, menghilangkan sampah secepat-cepatnya tapi tidak mengatasi produksi dan pengurangan sampah dari sumber. Masalahnya kan jumlah sampah Jakarta banyak, sudah banyak tidak terpilah dan sulit dikelola,” jelasnya.

“Seharusnya itu dulu fokusnya, mengurangi sampah dari sumber dan pemilahan-nya,” pungkasnya. ● yan

Heru Pastikan Ketua RT yang Terima Pungli dari Jukir Liar Bisa Dicapot

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono akan memberi sanksi tegas terkait adanya ketua RT di Jakarta yang menerima setoran Rp50 ribu per hari dari juru parkir (jukir) liar minimarket.

“Ya saya mendapatkan laporan dari kepala dinas perhubungan seperti itu (ada oknum RT yang dapat setoran dari jukir liar),” kata Heru di Jakarta, Jumat (17/5).

Ia menjelaskan bahwa sanksi tegas akan diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku di Pemerintah DKI Jakarta. Dirinya menyerahkan persoalan ini kepada asisten pemerintah DKI untuk mekanisme pemberian sanksi.

“Ya nanti melalui mekanisme di sana ada Pak Aspem (asisten pemerintahan) mekanisme Pak Lurah panggil RT-nya atau ada RW juga, ya diberi peringatan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Heru menegaskan Pemprov DKI perlu menilik aturan-aturan yang

ada di Peraturan Daerah (Perda). Lalu, bila terbukti melanggar Perda RT tersebut akan dipecah dan selanjutnya diganti.

“Ya tentunya di Perda kan ada, kita menegakkan Perda ada aturan semuanya. RT juga mengikuti aturan di Perda, kalau tidak disiplin bisa diganti,” urainya.

Mulai Rabu (15/5) lalu, Dishub DKI bersama Satpol PP dan TNI-Polri melakukan operasi pengawaman parkir liar di wilayah Jakarta.

Dalam operasinya, Dishub menertibkan sebanyak 12 jukir liar di sejumlah minimarket sepanjang Jalan Letjend Suprpto dan kawasan Raden Saleh, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pengakuan salah satu jukir liar saat hendak diamankan, dia mengaku menyetero uang Rp50 ribu pada ketua RT.

Dirinya pun mengarahkan petugas ke rumah ketua RT tersebut yang berada tepat di samping minimarket. ● yan

IMBAS NORMALISASI KALI CILIWUNG

Ganti Untung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

JAKARTA (IM) - Wakhiah (59), warga Rawajati yang rumahnya terdusur imbas normalisasi Kali Ciliwung, Jakarta Selatan, langsung membeli rumah baru usai mendapatkan uang ganti rugi. “Alhamdulillah saya mendapat ganti untung. Langsung beli rumah baru,” ujar dia saat ditemui di lahan bekas rumahnya, Jumat (17/5).

Wakhiah mengaku membeli rumah baru di Citayam, Depok. Ia membelinya secara tunai dengan uang ganti untung yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Saya dapat ganti untung

lebih dari Rp 300.000.000, lalu saya beli rumah dengan tipe 33 di Citayam,” tutur dia. Kendati begitu, Wakhiah mengaku belum menempat rumah barunya. Dia lebih sering beraktivitas di rumah anaknya yang berada di Kelurahan Rawajati. “Saya masih sering di sini, tetapi di rumah anak. Rumah dia enggak kena gusur soalnya,” kata dia.

Sebagai informasi, ada tiga RW yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Rawajati. Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin mengatakan, semua RW yang

terdampak merupakan wilayah rawan banjir. “Total ada tiga RW. Ada RW 1, RW 3, dan RW 7. Yang sudah *clear* RW 7, yang lain masih berproses,” kata dia, Jumat (17/5).

Munjirin mengatakan, akan dibangun tanggul di bekas area rumah warga yang sudah terdusur di bantaran Kali Ciliwung. Tanggul dibangun supaya air tak lagi menggenangi rumah warga saat debit air di Kali Ciliwung naik. Selain itu, akan dibuat jalan inspeksi atau jalan pengaman sungai di sepanjang aliran Kali Ciliwung. ● yan

DPRD Minta DKI Lengkapi Dokumen Penghapusan 417 Bus Transjakarta

JAKARTA (IM) - Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melengkapi seluruh dokumen terkait penghapusan dan lelang aset berupa

417 bus TransJakarta. “Kita minta data-data, surat-surat mereka, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diserahkan

kepada kita data-data itu,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rasyidi di Jakarta, Jumat (17/5).

Rasyidi menuturkan bus itu punya latar belakang pen-

gadaan dan sebagian terbukti tersangkut masalah hukum.

Karena itu, pihaknya memastikan belum memberi rekomendasi persetujuan penghapusan dan lelang aset pada 417 unit bus TransJakarta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Menurut dia, kelengkapan dokumen akan menjadi dasar DPRD untuk menyetujui penghapusan aset berupa ratusan bus tersebut agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari.

“Ini akan terus berproses sampai nanti anggota DPRD ini yakin terhadap permintaan mereka itu, baru kita sampaikan kepada Ketua DPRD,” ujarnya.

Dia menuturkan, sebanyak 417 unit bus TransJakarta yang sudah tak layak beroperasi itu terparkir di beberapa depo wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Sementara di Pulo Gebang, tercatat ada 44 unit bus yang kondisinya sudah karatan dan rusak parah.

“Ada catatan dari kami, misalnya, apakah proses penghapusan aset itu sudah sesuai ketentuan, aturan dan prosedur yang benar atau belum, cara penghapusannya sudah benar atau belum, appraisal (taksiran harga jual bangkai

bis yang terbaru) itu sudah benar atau belum,” katanya.

Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ismanto memastikan menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta Komisi C. Di harapkan proses penghapusan aset dan rencana melelang 417 unit bus TransJakarta itu dapat berjalan lancar.

“Berkaitan dengan yang dibahas dalam proses penghapusan aset ini, mengenai dokumen-dokumen dapat kami upayakan dalam waktu yang tidak lama sehingga proses-proses itu akan kami sampaikan ke Komisi C,” ujar Ismanto.

Kepala Tata Usaha Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Yusrizal Syah mengungkapkan, 417 unit bus yang akan dilelang itu merupakan hasil pengadaan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sejak 2003 hingga 2013. Yakin pengoperasian bus di Koridor 1 rute Blok M-Jakarta Kota.

“Terhadap 417 unit ini merupakan rangkaian pengadaan Pemprov DKI Jakarta, yakni Dinas Perhubungan dari tahun 2003 Busway Koridor 1 (Blok M-Jakarta Kota) sampai dengan (pengadaan) tahun 2013. 125 unit di antaranya dibeli pada tahun 2013,” ujar Yusrizal. ● yan

FOTO: ANT



TURNAMEN ROBOTIK INDONESIA 2024

Peserta mengoperasikan robot dengan kecerdasan buatan pada Turnamen Robotik Indonesia 2024 Piala Ketua MPR RI di GOR Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Jumat (17/5). Persatuan Robotika Seluruh Indonesia (PRSI) menyelenggarakan turnamen robotika dengan tema “Inovasi Berkelanjutan dibidang Robotika Menuju Indonesia Emas 2045” yang berlangsung 17-19 Mei 2024 yang diikuti 400 peserta dari seluruh Indonesia dengan tujuh kategori lomba yaitu Robot Sumo, Robot Soccer, Robot Line Follower, Robot Kreatif Rancang Bangun, Robot Transporter, Robot Amphibious Solar Vehicle, dan Robot Kreatif Smartphone/Wifi-controlled.